

ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI RASKIN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS RUMAH TANGGA DI DESA KARANG WARU KECAMATAN LAWANG WETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Oleh : Drs. Bambang Sutikno, M. Si.
Handphone : 0812-73-001313
Email : Bambangstia01@gmail.com
(Dosen STIA Bengkulu)

ABSTRAK

Kebijakan program penyaluran Raskin belum berjalan efektif sesuai dengan sasaran program, dimana pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan, karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan Pedoman Umum Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 10 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan yang terpilih terkait pelaksanaan Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga Di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data empiris dan didukung data kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan (1) Pelaksanaan Program Raskin di Desa Karang Waru, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Banyuasin pada dasarnya telah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan pedoman umum Program Raskin yang ada. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek penilaian tentang efektivitas yang dinilai dari 6 T yaitu tepat sasaran penerima manfaat, Raskin yang dibagikan telah sesuai dengan RTS-PM yang terdaftar sehingga para RTS-PM menjadi terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran sehari-hari. (2) Faktor kunci keberhasilan Efektivitas pelaksanaan program Raskin di Desa Karang Waru tidak lepas dari nilai dasar pengelolaan yang dikenal dengan istilah “prinsip-prinsip pengelolaan” yaitu Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas.

Kata Kunci : Efektivitas, Distribusi, dan Raskin.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan pada masyarakat merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat diantaranya adalah Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek (Soeharto, 2008:56).

Adapun kebijakan yang terkait penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan sejalan dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil sensus oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per

bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.096.500 orang (13,39 %) dimana presentasi ke-miskinan di tingkat desa di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 8,64 % jauh lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di perkotaan yang hanya 4,75 % (Data BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2017).

Berdasarkan data tersebut pengurangan kemiskinan di perdesaan haruslah menjadi prioritas. Salah satu bentuk program kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah Kebijakan Program Raskin yang subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada akhirnya diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin (Kartasasmita, 2006:40). Desa Karang Waru

adalah salah satu desa di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan program beras miskin di wilayahnya. Pelaksanaan program yang dilaksanakan bertujuan untuk meringankan beban belanja Rumah Tangga Sasaran (RTS) terhadap kebutuhan pangan beras di Desa Karang Waru.

Hasil observasi pra penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kebijakan program penyaluran Raskin belum berjalan efektif sesuai dengan sasaran program, dimana pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan, karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan Pedoman Umum Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 10 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa distribusi Raskin di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu perhatian untuk mencapai penyaluran Raskin yang lebih efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga Di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin.”

Adapun rumusan permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam hal ini yaitu :

1. Bagaimanakah Analisis Efektivitas Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga Di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Analisis Efektivitas Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga Di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Analisis

Menurut Syahrul dan Mohammad Abdinizar (2000:24) yang dimaksud menganalisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Definisi analisis tersebut memberi gambaran tentang kegiatan membedah unsur-unsur dari sesuatu yang diteliti, dalam hal ini berarti membedah unsur-unsur laporan keuangan, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan memperoleh

pengertian dan pemahaman yang baik dan mendalam atas sesuatu program/kegiatan.

Pengertian Efektivitas

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Kemampuan pegawai yang ada di lembaga pemerintah sangat penting, arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa tunjangan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang. Pengembangan kemampuan SDM pada hakikatnya adalah rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target yang diharapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan hasil yang dicapai, sehingga efektivitas memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dicapai.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) status organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil tujuan yang dikehendaki.

Ukuran Efektivitas

Efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan apabila ada beberapa indikator sebagai ukuran efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2005:61) untuk efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu :

1. Input

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil, meliputi sumber daya manusia, biaya dan sarana prasarana.

2. Proses

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai seperti *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam pencapaian hasil. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.

3. Hasil

Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja organisasi. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara usaha dan hasil, target dan

realisasi serta persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

4. Produktivitas

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada kualitas atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.

Kriteria Efektivitas

kriteria efektivitas dari sebuah organisasi ditentukan oleh lima unsur yang dikemukakan oleh Danim (2004:120), yaitu:

1. Hasil produksi, hasil produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.
2. Efisiensi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, dan sebagainya.
3. Kepuasan, kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.
4. Penyesuaian, penyesuaian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
5. Kelangsungan, kelangsungan sebagai kriteria efektivitas yang mengacu kepada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Dalam praktek, para manajer menggunakan indikator jangka pendek untuk keberlangsungan jangka panjang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor pendukung efektivitas yaitu:

1. Ciri Organisasi

Ciri organisasi dalam suatu organisasi dapat dilihat dari struktur dan teknologi organisasi yang mempunyai segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur dapat ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formasi (Steers, 2005:209).

2. Lingkungan

Disamping organisasi, lingkungan dalam pencapaian efektivitas mempunyai pengaruh yang sangat besar. Keberhasilan hubungan organisasi dan lingkungan bergantung pada tiga hal yaitu: (1) Keadaan lingkungan, (2) Ketetapan persepsi, (3) Tingkat rasionalitas. Ketiga faktor tersebut berpengaruh kepada organisasi terhadap perubahan lingkungan. Semakin tepat tanggapannya, semakin berhasil adaptasinya yang dilakukan oleh organisasi (Steers, 2005:210).

3. Pekerja dan Pegawai

Faktor yang berpengaruh yang ketiga atau efektivitas adalah para pekerjaan atau pegawai itu sendiri. Faktor pekerja berpengaruh terhadap efektivitas karena perilaku pekerjalah dalam jangka panjang akan memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan organisasi (Steers, 2005:211).

Kesadaran akan sifat perbedaan pegawai yang terdapat diantara pegawai sangat penting, karena pegawai yang berbeda akan memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula. Pentingnya mengetahui perbedaan pegawai, maka organisasi dapat menyesuaikan kemampuan dan kepribadian para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan.

Definisi Kemiskinan

kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Pada dasarnya kemiskinan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan; penyebab individual, atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari sisi orang miskin itu sendiri; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan.
2. Pemerintahan yang baik.
3. Pembangunan sosial.

Di berbagai negara program yang telah dilakukan dalam upaya pengurangan kemiskinan adalah bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin; bantuan terhadap individual, yakni upaya yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukum, pendidikan, kerja sosial, pencari kerja, persiapan bagi yang lemah, yakni upaya yang dilakukan dengan menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan (Afrida, 2012).

Program Raskin

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/Rumah Tangga Miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp 1.600 per kg (netto) di titik distribusi.

Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog (Badan Urusan Logistik). Pelaksanaan program Raskin melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Perum Bulog yang bertugas secara formal dan material untuk pelaksanaan program Raskin sampai penyalurannya di titik distribusi yaitu bisa di Kecamatan atau di Kelurahan, sedangkan distribusi ke titik bagi itu menjadi tugas dari pemerintah daerah.

Tujuan Program Raskin

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program Raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

Kebijakan Program Raskin

Program Raskin telah mengalami beberapa kali penyesuaian, namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Program Raskin adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan beras dengan harga penjualan bersubsidi kepada masyarakat miskin. Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15 kg/KK/bulan. Beras diberikan tidak dengan cuma-cuma. Penerima bantuan Raskin harus membayar dengan harga Rp 1.600 per kg netto di titik distribusi.

Indikator Program Raskin

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 (enam) T yaitu tepat : sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, dan administrasi. Distribusi Raskin dianggap efisien jika mampu menyampaikan beras untuk keluarga miskin ke penerima manfaat dengan biaya distribusi yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkatnya. Ada dua implikasi langsung dari pemberian Raskin ini bagi keluarga miskin yang menerimanya. Pertama, dengan mendapatkan jumlah Raskin seperti yang ditetapkan, maka diharapkan keluarga miskin akan dapat mempertahankan asupan kalori dan gizinya. Kedua, pendapatan suplementer yang timbul diharapkan dapat digunakan oleh keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dimana kegiatan diawali dengan melihat kondisi masyarakat di Desa Karang Waru yang kemudian dijadikan sebagai asumsi dasar untuk menjelaskan adanya keadaan terkini dari kebijakan Program Penyaluran Raskin di Desa Karang Waru selama ini. Setelah mengadakan observasi, kemudian dilengkapi oleh data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber lain terkait dengan Analisis Efektivitas Distribusi Raskin dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur berkenaan dengan kebijakan Program Raskin.

Definisi operasional penelitian adalah suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep yang dapat diobservasi gejalanya di lapangan. Adapun indikator yang digunakan dalam mendeskripsikan efektivitas Distribusi Raskin dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat di Desa Karang

Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut.

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Efektivitas Distribusi Raskin (Pedoman Umum Raskin, 2013)	1. Tepat sasaran. 2. Tepat jumlah. 3. Tepat harga. 4. Tepat waktu. 5. Tepat kualitas. 6. Tepat administrasi.
2.	Penanggulangan Kemiskinan (Sahadan, 2008:61)	1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan. 2. Pemerintah yang baik. 3. Pembangunan sosial.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari :

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Desa Karang Waru	1 (satu) Orang
2.	Sekretaris Desa Karang Waru	1 (satu) Orang
3.	Staff/Pegawai Kantor Desa Karang Waru	3 (tiga) Orang
4.	Masyarakat Penerima Bantuan	6 (enam) Orang
Jumlah		11 (sebelas) Orang

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4 (empat) cara, sebagai berikut : Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dengan informan.

Menurut Masri (2006:42) Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.
3. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi pada catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya.

HASIL PENELITIAN

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

A. Efektivitas Distribusi Raskin

Efektivitas pengelolaan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) adalah proses pelaksanaan program Raskin dilihat dari aspek, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin 6T, yang

meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran Penerima

Penetapan sasaran atau rumah tangga penerima manfaat program ini berdasarkan pada Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K (Kemenko Kesra, 2013). Berdasarkan pada hasil survei lapangan di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan mengenai efektivitas distribusi Raskin menunjukkan tingkat ketepatan sasaran di lokasi penelitian sebagai berikut : Jumlah RTS-PM DP-M2 Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah 202 penerima sesuai dengan DPM1 yang didata oleh Tim Raskin.

2. Tepat Kualitas

Berdasarkan hasil *observasi* dan wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa Kualitas beras yang didistribusikan ke RTS-PM Desa Karang Waru belum berkualitas baik, hal ini ditemukan terkadang masih ada kualitas beras berwarna kuning dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Tepat Jumlah

Berdasarkan hasil *observasi* dan wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa jumlah beras yang di terima masyarakat Desa Karang Waru berubah-ubah, tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Karang Waru. Jumlah yang diterima oleh masing-masing rumah tangga yakni 15 kg/KK/bulan (Kemenko Kesra, 2013). Dari hasil survei lapangan menunjukkan bahwa semua masyarakat penerima Raskin di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan menerima jumlah beras sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Tepat Harga

Berdasarkan hasil *observasi* dan wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa jumlah beras yang di terima masyarakat Desa Karang Waru berubah-ubah, tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Karang Waru. Jumlah yang diterima oleh masing-masing rumah tangga yakni 15 kg/KK/bulan (Kemenko Kesra, 2013). Dari hasil survei lapangan menunjukkan bahwa semua masyarakat penerima Raskin di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan menerima jumlah beras sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Tepat Waktu

Berdasarkan hasil *observasi* dan wawancara, maka Peneliti menyimpulkan bahwa Masih terjadi hambatan dalam pelaksanaan Raskin di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan, seperti yang dikemukakan oleh pihak pelaksana Raskin dan RTS-PM, akses jalan menuju Desa Karang Waru agak buruk sehingga mempengaruhi waktu distribusi Raskin. Dan juga komunikasi dengan ketua RT yang masih belum optimal sehingga menjadikan penyaluran Raskin ke RTS-PM tidak tepat waktu dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Data diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat ketepatan waktu distribusi bantuan beras ini belum mencapai 100%, artinya efektivitas dari program ini belum memuaskan.

6. Tepat Administrasi

Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), hal ini dilakukan dalam sistem pendataan RTS-PM, sebagai contoh ketika RTS-PM ada yang meninggal, maka akan ada pemutakhiran data dengan mengganti RTS-PM yang diambilkan dari keluarga atau saudaranya. Kalau sudah tidak ada, maka akan diganti dengan RTS-PM yang lainnya dengan mengisi Formulir Rekapitulasi Pengganti (RPS) selanjutnya akan dikirim ke Kecamatan dan Perum BULOG.

B. Penanggulangan Kemiskinan

Adapun indikator dalam penanggulangan kemiskinan akan dibahas dalam hasil penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pemaparan tersebut menjadikan pemahaman ketika kita analogikan kepada pelaksanaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan melalui Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin pada dasarnya akan berhasil dan mencapai tujuannya ketika dijalankan oleh sumber daya aparatur yang memang profesional pada bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara 18 April 2019 peneliti menyimpulkan bahwa dalam manajemen pelaksanaan tahap penyaluran Raskin telah berjalan dengan baik tetapi kadang terkendala waktu penyaluran yang tidak tepat waktu, proses pembagian Raskin setiap tiga bulan sekali, dan diharapkan penggunaan uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan kesejahteraan rumah tangga miskin secara berkala.

2. Pemerintahan yang baik

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, program bantuan Raskin memberikan *income effect* kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, sedangkan untuk jangka panjang, program ini akan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas nutrisi. Program bantuan Raskin secara tidak langsung merupakan jaminan yang melindungi masyarakat di bidang pangan dan diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat di masa yang akan datang melalui bidang pangan.

Penggunaan bantuan Raskin ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah warga yang benar-benar membutuhkan., karena hal ini sudah ketentuan dalam program Raskin yang berhak menerima bantuan.

3. Pembangunan sosial

Berdasarkan *observasi* dan wawancara tanggal 17 April 2019, peneliti simpulkan bahwa dalam perencanaan kegiatan komunikasi terdapat

permasalahan seperti Bahasa yang digunakan/ disampaikan terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan peserta PKH yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang sehingga menghambat sosialisasi, kemudian banyaknya rumah tangga sangat miskin yang cenderung tidak menyadari bahwa pentingnya program ini untuk perubahan sosial ekonominya ke depan.

Hasil wawancara tersebut menjadi suatu gambaran bagi peneliti bahwa faktor lingkungan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Karang Waru pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Uraian-uraian yang telah peneliti paparkan di atas menjadikan suatu pemahaman bahwa telah ada usaha yang cukup baik yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dimana dalam pelaksanaan program penyaluran Raskin di Desa Karang Waru walaupun dalam aspek-aspek lainnya membutuhkan evaluasi lebih lanjut agar proses pemanfaatannya dapat berjalan lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Raskin di Desa Karang Waru, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Banyuasin pada dasarnya telah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan pedoman umum Program Raskin yang ada. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek penilaian tentang efektivitas yang dinilai dari 6 T yaitu tepat sasaran penerima manfaat, Raskin yang dibagikan telah sesuai dengan RTS-PM yang terdaftar sehingga para RTS-PM menjadi terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran sehari-hari.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas distribusi Raskin dalam penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sumber daya manusia dan sumber daya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gibson. 2006. *Organisasi Perilaku dan Proses*. Jakarta Barat : Binapura Aksara.
- Ginandjar, Kartasasmita. 2006. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cakra.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : YKPN.
- Malayu, S. P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. cetakan kesembilan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Prastowo. Dwi. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Sedarmayanti. 2005. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Ilham Jaya.

- Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S.
- Soemitro. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta : PT. RinekaCipta.
- Steers, M. Richard. 2005. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Alfabeta : Bandung.
- Suparlan, Parsudi. 2000. *Kemiskinan Di perkotaan*. Sinar Harapan : Jakarta.
- Venny, A. 2010. *Memberantas Kemiskinan dari Parlemen : Manual MDGs untuk Anggota Parlemen di Pusat dan Daerah*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- PERPRES Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 (SKB Mendagri dan Dirut Perum Bulog).
- Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2013.